



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KOMANG ADI SUJENDRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 487868

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 1719 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/357 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, HONDA ALL NEW CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 832.685.233



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.797.685.233
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.797.685.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.